

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dalam rangka persiapan menghadapi persaingan global, standar akuntansi keuangan di Indonesia telah mengalami perubahan. Indonesia yang merupakan negara anggota G20 forum serta bagian dari IFAC (*International Federation of Accountant*) harus tunduk kepada SMO (*Statement Membership Obligation*). Hasil kesepakatan dari pertemuan negara-negara G20 forum adalah penetapan standar akuntansi keuangan yang dipakai secara internasional yaitu IFRS (*International Financial Reporting Standards*).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 50/55 (Revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan merupakan adopsi dari standar akuntansi keuangan internasional (IFRS) yaitu *International Accounting Standard* (IAS) 32 mengenai *presentation and disclosures of Financial Instruments* yang diadopsi ke dalam PSAK 50 tentang penyajian pengungkapan instrumen keuangan dan IAS 39 mengenai *recognition and measurement of Financial Instruments* yang diadopsi ke dalam PSAK 55 tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. Penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan diberlakukan per tanggal 1 Januari 2010 setelah ditunda dari 1 Januari 2009.

Indonesia perlu melakukan konvergensi Pernyataan Standar Akuntansi Indonesia (PSAK) ke *International Financial Reporting Standards* (IFRS) agar

dapat meningkatkan daya informasi laporan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Konvergensi PSAK menjadi perhatian para pelaku dunia usaha di Indonesia mengingat ruang lingkup usaha perusahaan Indonesia tidak hanya di dalam negeri saja, melainkan juga secara internasional (Ketut Tanti, 2012). Walau tidak mudah, tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia harus segera melakukan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional melalui penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan. Penundaan penerapan standar internasional hanya akan mempersulit posisi perusahaan dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat. Implementasi PSAK 50/55 (revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan secara tepat dan konsisten diharapkan dapat meningkatkan keinformatifan, relevansi nilai, dan transparansi dari laporan keuangan, sehingga dapat memberikan informasi yang lebih bermanfaat dan lebih andal bagi pengguna laporan keuangan (Oktavia dkk, 2014).

Penelitian terdahulu menemukan bahwa penerapan IAS 32 dan 39 (PSAK 50 dan 55 di Indonesia) meningkatkan relevansi laporan keuangan. Viska Anggraita pada tahun 2013 meneliti dampak penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) terhadap Relevansi Nilai Komponen Dalam Laporan Posisi Keuangan. Hasil penelitiannya menunjukkan terjadinya peningkatan relevansi nilai buku ekuitas dalam laporan posisi keuangan setelah penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006). Hasil penelitian Aida Rohma dan Retno Yuni (2013) menunjukkan bahwa terjadi peningkatan relevansi nilai pada *price model*. Penelitian Aida Rohma dan Retno Yuni (2013) yang juga meneliti dampak penerapan SAK adopsi IFRS terhadap Asimetri Informasi menemukan hasil terjadinya penurunan Asimetri Informasi

laporan keuangan. Pratiwi dan Desniawati (2012) melihat dampak SAK adopsi IFRS terhadap Asimetri Informasi pada 12 bank di Indonesia, dan hasilnya tidak terjadi perbedaan Asimetri Informasi laporan keuangan yang signifikan antara sebelum dan sesudah adopsi IFRS. Namun, meskipun tidak signifikan, secara rata-rata telah terjadi kenaikan *bid-ask spread*.

Laporan keuangan merupakan alat utama manajer perusahaan dalam menunjukkan efektivitas, yang dapat digunakan oleh pihak eksternal dalam menilai kinerja perusahaan. Dalam rangka mencapai tujuan dan berguna bagi pengguna laporan keuangan, diperlukan sebuah standar akuntansi keuangan yang tepat dalam pengungkapannya. Salah satu karakteristik laporan keuangan yang perlu dipenuhi adalah relevan (*relevance*).

Relevan (*relevance*) merupakan salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan, yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi para pengguna. Menurut Subekti (2010), relevansi nilai informasi akuntansi adalah kemampuan informasi akuntansi dalam menjelaskan nilai perusahaan berdasarkan nilai pasar. Informasi akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan dibutuhkan oleh investor untuk membantu pengambilan keputusan terhadap pemilihan investasi. Oleh sebab itu, laporan keuangan harus dapat mengungkapkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Indikator bahwa suatu informasi akuntansi relevan adalah jika informasi tersebut memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap harga saham. Jika informasi akuntansi bermanfaat dan digunakan oleh investor sebagai dasar dalam membuat keputusan, maka reaksi investor tersebut akan tercermin pada harga saham (Ni Putu dan Carmel, 2011).

Penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) dapat meningkatkan relevansi nilai laporan keuangan karena memiliki karakteristik utama berbasis nilai wajar (*fair value*). Kondisi pasar yang semakin dinamis dan berkembang sangat cepat menyebabkan konsep *historical cost* dianggap tidak cocok lagi, tidak relevan karena tidak mencerminkan nilai pasar yang sebenarnya. Sebagai gantinya, digunakanlah *fair value* (Akuntan Indonesia, 2009:17). Akuntansi nilai wajar lebih mencerminkan kondisi pasar sehingga memberikan informasi yang lebih tepat waktu, meningkatkan transparansi, dan memungkinkan tindakan perbaikan yang cepat (Swamy dan Vijayalakshmi, 2012). Banyaknya pengukuran yang didasarkan pada nilai wajar diharapkan dapat meningkatkan relevansi nilai dari laporan keuangan suatu perusahaan, dengan perannya yang dapat mengurangi kesempatan manajemen perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangan.

Terkait dengan relevansi nilai informasi akuntansi, ada beberapa fenomena yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat relevansi nilai laporan keuangan yang rendah. Salah satunya kasus yang terjadi di enam perusahaan Grup Bakrie dan satu perusahaan lainnya. Enam perusahaan Bakrie itu adalah Bakrie Sumatra Plantation, Energi Mega Persada, Bumi Resources, Bakrie Telecom, Bakrieland Development, dan Darma Henwa. Sedangkan satu perusahaan lainnya adalah Benakat Petroleum Energy. Keributan bermula dari adanya dana triliunan rupiah di ketujuh perusahaan itu yang pencatatannya diduga bermasalah. Dalam laporan keuangan kuartal pertama tahun ini, perusahaan Grup Bakrie menyebutkan memiliki dana deposito sekitar Rp 6,8 triliun di Bank Capital Indonesia. Padahal seluruh dana nasabah di bank swasta ini

hanya Rp 2,7 triliun. Jadi tidak mungkin ketujuh perusahaan tersebut memiliki dana deposito sebesar itu. Hal ini memunculkan berbagai spekulasi tak sedap. Sorotan utama tertuju pada dua perusahaan Grup Bakrie yaitu Bakrie Sumatra Plantation dan Energi Mega Persada, dengan kepemilikan deposito Rp 4,6 triliun (sumber: www.tempo.co).

Kasus yang secara serentak terjadi di perusahaan Grup Bakrie ini menyebabkan kepercayaan investor negatif terhadap kinerja perseroan. Krisis kepercayaan investor membuat saham-saham dalam kelompok usaha Bakrie terkulai pada perdagangan saham. Pemicu utama penurunan harga saham Bakrie karena gaya kelola perusahaan yang buruk. Banyak sekali informasi yang seharusnya diketahui publik tapi tidak dibuka secara transparan, khususnya soal tata kelola utang. Tidak terbukanya Grup Bakrie dalam pengelolaan utang ini membuat investor gamang. Investor memandang gunungan utang sebagai hal yang merugikan bisnis perusahaan di masa mendatang (sumber: www.investasi.kontan.co.id). Masalah-masalah tersebut yang kemudian membuat saham-saham Grup Bakrie tertekan. Lima dari tujuh saham grup Bakrie rontok, sisanya stagnan (sumber: www.economy.okezone.com).

Kasus lain yang menyebabkan menurunnya saham perusahaan juga terjadi di PT Cipaganti Citra Graha Persada Tbk (CPGT). Perusahaan Cipaganti adalah salah satu perusahaan publik yang bergerak di bidang jasa, khususnya transportasi. Tiga petinggi perusahaan Cipaganti Group, AS, DSR, dan YTS melakukan penipuan dengan modus kegiatan koperasi yang bekerja sama dengan sekitar 8.700 mitra usaha yang ingin menanamkan modalnya. Untuk kegiatan

koperasi itu terkumpul dana sekitar Rp 3,2 triliun. Sistemnya yaitu bagi hasil antara 1,6 % sampai 1,95 % per bulan tergantung tenor (jangka waktu), dengan kesepakatan. Dana akan dikelola oleh koperasi untuk kegiatan perumahan, SPBU, transportasi, perhotelan, alat berat, dan tambang. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan, dana mitra tersebut digunakan kepada PT CCG sebesar Rp 200 miliar, PT CGT sebesar Rp 500 miliar, PT CGP Rp 885 Juta. Keseluruhannya merupakan milik pelaku dengan kesepakatan bagi hasil 1,5% dan 1,75%. Kenyataannya, koperasi gagal bayar dan tidak berjalan. Sedangkan sisa uang mitra tidak jelas penggunaannya, dan cenderung tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, dari hasil penyelidikan, selama ini dana yang digunakan untuk memberikan bagi hasil bulanan kepada mitra yang lebih dulu menjalin kerja sama, dipastikan berasal dari dana mitra lainnya yang ikut bergabung belakangan, atau gali lubang tutup lubang.

Atas kasus tersebut, mayoritas pemegang saham PT Cipaganti menyatakan tidak menyetujui laporan keuangan tahun buku 2013 dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal tersebut kemudian berdampak pada saham PT Cipaganti yang merosot pada perdagangan saham Rabu (16/4/2014), dikarenakan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada yang tengah sulit membayar imbal hasil kepada investornya memberikan sentimen negatif ke saham CPGT (sumber: www.liputan6.com).

Berbagai cara dilakukan oleh manajer perusahaan untuk terus meningkatkan kinerja perusahaan. Keinginan manajer untuk menunjukkan kinerja keuangan yang baik dalam menghasilkan nilai atau keuntungan maksimal

seringkali membuat manajer kurang memperhatikan kebutuhan akan informasi akuntansi yang relevan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi, baik bagi pihak internal dalam membuat kebijakan terkait pembuatan laporan keuangan, maupun bagi pihak eksternal seperti investor.

Fenomena lain yang terjadi di PT KAI merupakan salah satu contoh kasus laporan keuangan yang tidak relevan karena tindakan manajemen laba. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia (KAI) 2005. Perusahaan jasa itu dicatat meraih keuntungan sebesar 6,9 milyar. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan seharusnya menderita kerugian 63 milyar. Laporan keuangan tersebut sebelumnya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) S. Maman. Setelah hasil audit tersebut diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan dari Laporan keuangan PT KAI (sumber: www.tempo.co).

Karakteristik *full disclosure* dari PSAK 50/55 (revisi 2006) mengharuskan pengungkapan yang lebih luas. Gjerde *et al* (2011) mengungkapkan bahwa sebuah laporan keuangan yang berkualitas tinggi dapat memberi andil dalam meningkatkan kualitas keputusan ekonomi yang dibuat oleh manajer dan oleh penyedia modal seperti investor dan kreditor. Dengan demikian, diharapkan penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) dapat menambah kemampuan laporan keuangan dalam menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Implikasi selanjutnya adalah asimetri (kesenjangan) informasi antara *agent* dan *principal* dapat terjembatani.

Asimetri Informasi merupakan suatu kondisi dimana ada ketidakseimbangan perolehan informasi antara manajemen sebagai penyedia informasi dengan pihak pemegang saham dan *stakeholder* pada umumnya sebagai pengguna informasi (Desniawati dan Pratiwi, 2011). Adanya Asimetri Informasi akan mendorong manajer untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya (manajemen laba), terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja manajer. Oleh sebab itu, pengungkapan yang lebih rinci sangat diperlukan untuk mengurangi penyajian informasi yang tidak sebenarnya, dan membantu pembaca laporan keuangan tidak salah interpretasi.

Fenomena Asimetri Informasi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia adalah di Bank Lippo Tbk. Kasus ini merupakan contoh kasus Asimetri Informasi. Salah satu bank peserta rekapitalisasi itu memberikan laporan berbeda ke publik dan manajemen BEJ. Dalam laporan keuangan per 30 September 2002 yang disampaikan ke publik pada 28 November 2002 disebutkan total aktiva perseroan Rp 24 triliun dan laba bersih Rp 98 miliar. Namun dalam laporan ke BEJ pada 27 Desember 2002 total aktiva perusahaan berubah menjadi Rp 22,8 triliun rupiah (turun Rp 1,2 triliun) dan perusahaan merugi bersih Rp1,3 triliun.

Perbedaan laporan keuangan itu segera memunculkan kontroversi dan polemik. Manajemen beralasan perbedaan itu terjadi karena ada penurunan aset yang diambil alih atau *foreclosed asset* dari Rp 2,393 triliun menjadi Rp 1,420 triliun. Namun beberapa pihak menduga perbedaan laporan keuangan terjadi karena ada manipulasi yang dilakukan manajemen. Dugaan itu beralasan karena agunan yang dijadikan aset berasal dari kelompok Lippo, yakni PT Bukit Sentul

Tbk, PT Lippo Karawaci Tbk, PT Lippo Cikarang Tbk, PT Lippo Securities Tbk, PT Hotel Prapatan Tbk, dan PT Panin Insurance Tbk. Bank Lippo diduga juga melanggar di pasar modal berupa perdagangan memanfaatkan informasi dari orang dalam (*insider trading*). Selanjutnya, kasus ini jika tidak diatasi secara baik akan berpotensi menurunkan kepercayaan publik, khususnya yang berkecimpung di bursa. Investor yang telanjur membeli saham Bank Lippo tentu sangat kecewa dan merasa dicurangi (sumber: www.suaramerdeka.com).

Kasus Asimetri Informasi juga terjadi di Bank Century pada tahun 2008. Kasus ini termasuk ke dalam *moral hazard* yang merupakan salah satu dari 2 tipe Asimetri Informasi. *Moral hazard* adalah jenis Asimetri Informasi yang mana pihak pemegang saham atau pemberi pinjaman tidak dapat sepenuhnya mengamati kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer. Hal ini menyebabkan manajer dapat melakukan tindakan yang dapat berdampak tidak baik bagi perusahaan dan pemegang saham. Kasus bermula saat beberapa nasabah besar Bank Century (Budi Sampoerna, PT Timah Tbk, dan PT Jamsostek) menarik dana yang disimpan di bank besutan Robert Tantular itu, sehingga Bank Century mengalami kesulitan likuiditas. Pada tanggal 1 Oktober 2008, Budi Sampoerna tak dapat menarik uangnya yang mencapai Rp 2 triliun di Bank Century. Gubernur Bank Indonesia, Boediono, membenarkan Bank Century kalah kliring atau tidak bisa membayar dana permintaan dari nasabah sehingga terjadi *rush* (sumber: www.tempo.co).

Pada Juni 2009, Bank Century mengaku mulai mencairkan dana Budi Sampoerna yang diselewengkan Robert Tantular sekitar US\$ 18 juta, atau sepadan

dengan Rp 180 miliar. Namun, hal ini dibantah pengacara Budi Sampoerna, Lucas, yang menyatakan bahwa Bank Century belum membayar sepeserpun pada kliennya. Setelah KPK melakukan audit terhadap Bank Century, mantan Direktur Utama Bank Century Hermanus Hasan Muslim divonis 3 tahun penjara karena terbukti menggelapkan dana nasabah Rp 1,6 triliun. Dan tanggal 18 Agustus 2009, Komisaris Utama yang juga pemegang saham Robert Tantular dituntut hukuman delapan tahun penjara dengan denda Rp 50 miliar subsidi lima tahun penjara karena diduga mempengaruhi kebijakan direksi sehingga mengakibatkan Bank Century gagal kliring. Laporan awal audit BPK mengungkapkan banyak kelemahan dan kegagalan serius di balik penyelamatan Bank Century dan ada dugaan pelanggaran kebijakan dalam memberikan bantuan ke Bank Century. Terkait dengan *moral hazard*, dalam kasus ini Budi Sampoerna tidak dapat sepenuhnya mengamati kegiatan yang dilakukan oleh Robert Tantular, yang menyebabkan Robert Tantular dapat melakukan tindakan yang berdampak tidak baik bagi Bank Century dan pemegang saham (sumber: www.tempo.com).

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian yang dilakukan oleh Viska Anggraita (2013) dan penelitian yang dilakukan oleh Aida Rohmah dan Retno Yuni N.S (2013). Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan melalui beberapa fenomena yang terjadi di lingkungan perusahaan, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan PSAK 50/55 (Revisi 2006) Tentang Instrumen Keuangan Terhadap Relevansi Nilai Informasi Akuntansi dan Asimetri Informasi: Studi Pada Perusahaan Jasa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia**”.

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1. Identifikasi Masalah

Bertitik tolak pada uraian latar belakang penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, tema sentral permasalahan penelitian ini antara lain:

1. Rendahnya tingkat Relevansi Nilai Informasi Akuntansi Perusahaan Jasa di Indonesia.
2. Tingginya tingkat Asimetri Informasi Perusahaan Jasa di Indonesia.
3. Penggunaan standar akuntansi keuangan yang kurang tepat dengan kualitas yang kurang baik, yang memungkinkan manajemen untuk melakukan manipulasi atas laporan posisi keuangan perusahaan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan pengadopsian standar akuntansi keuangan internasional untuk meningkatkan transparansi, kredibilitas, dan akuntabilitas laporan keuangan. Tingkat kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh standar akuntansi keuangan yang digunakan. Standar akuntansi keuangan yang baik mampu meningkatkan keinformatifan, relevansi nilai, dan tranparansi dari laporan keuangan, sehingga dapat memberikan informasi yang lebih bermanfaat dan lebih andal bagi pembaca laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan PSAK 50/55 (revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan sebagai standar akuntansi keuangan yang merupakan adopsi dari standar akuntansi keuangan internasional (IFRS). Pemilihan PSAK 50/55 (revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan dilakukan atas pertimbangan Indonesia akan menghadapi persaingan global yang semakin ketat, sehingga harmonisasi standar akuntansi keuangan internasional tidak dapat ditunda lagi.

1.2.2. Rumusan Masalah Penelitian

Atas dasar tema sentral tersebut di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk menyelidiki secara empiris beberapa permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana sebelum dan sesudah penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan di Perusahaan Jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Bagaimana Relevansi Nilai Informasi Akuntansi Perusahaan Jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Bagaimana Asimetri Informasi di Perusahaan Jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Seberapa besar dampak penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan terhadap Relevansi Nilai Informasi Akuntansi Perusahaan Jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
5. Seberapa besar dampak penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan terhadap Asimetri Informasi di Perusahaan Jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
6. Apakah terdapat perbedaan Relevansi Nilai Informasi Akuntansi sebelum dan sesudah penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan?
7. Apakah terdapat perbedaan Asimetri Informasi sebelum dan sesudah penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Secara khusus, tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui sebelum dan sesudah penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) di Perusahaan Jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui Relevansi Nilai Informasi Akuntansi Perusahaan Jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui Asimetri Informasi di Perusahaan Jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk mengetahui seberapa besar dampak penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) terhadap Relevansi Nilai Informasi Akuntansi Perusahaan Jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Untuk mengetahui seberapa besar dampak penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) terhadap Asimetri Informasi di Perusahaan Jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
6. Untuk mengetahui perbedaan Relevansi Nilai Informasi Akuntansi sebelum dan sesudah penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan.
7. Untuk mengetahui perbedaan Asimetri Informasi sebelum dan sesudah penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis/Akademis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perkembangan ilmu akuntansi dan menambah kajian ilmu akuntansi mengenai analisis penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) terhadap Relevansi Nilai Informasi Akuntansi dan Asimetri Informasi.

1.4.2. Kegunaan Praktis/Empiris

Hasil penelitian yang berupa sekumpulan informasi yang diperoleh ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi semua pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan pengalaman berharga bagi Penulis yang dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang penerapan ilmu teori yang Penulis peroleh di bangku kuliah dengan penerapan yang sebenarnya, khususnya tentang penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006).

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak manajemen perusahaan, khususnya akuntan, untuk lebih memperhatikan Relevansi Nilai Informasi Akuntansi dan Asimetri Informasi sehubungan dengan penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006).

3. Bagi Investor dan Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai analisis penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) terhadap Relevansi Nilai Informasi Akuntansi dan Asimetri Informasi, sehingga dapat diperoleh gambaran dalam menentukan keputusan penilaian perusahaan dan investasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk mengadakan penelitian serupa.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2008 sampai 2011. Dalam pengumpulan data, Peneliti mengunjungi Bursa Efek Indonesia di Jalan Veteran dan situs resminya www.idx.co.id dengan waktu penelitian dimulai pada Bulan Januari 2015 sampai dengan selesai.